

BELANJA MODAL: FAKTOR APA YANG MEMPENGARUHI?

Jouzar Farouq Ishak¹⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, Bandung Barat

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect local own-source revenue, balanced funds, and a budget surplus of capital expenditures. The method used is multiple regression with the SPSS analysis tool in Indonesian provincial governments in 2010-2020. Furthermore, the results of this study show that among the components of the regional budget, local own-source revenue have the greatest impact on capital expenditures than balanced fund and budget surplus. When the Covid-19 pandemic affects local-own source revenue in the provincial government that do not meet the target, the provincial government will reduce the capital expenditure budget. The results of this study suggest that good quality financial management should provide an additional fiscal space so that the implementation of policies that favor the people can be implemented more effectively.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Balance Fund, Budget Surplus*

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mewarnai perjalanan perekonomian pada tahun 2020 dengan timbulnya efek di luar perkiraan terhadap bidang kesehatan, kemanusiaan, maupun ekonomi. Pandemi ini menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk yang pernah dihadapi dunia sejak *2nd World War* dan krisis ekonomi yang mengguncang seluruh dunia sejak *Great Depression* [1]. Kompleksitas dampak ekonomi Covid-19 mengancam ketahanan ekonomi global dan memungkinkan terjadinya krisis ekonomi yang tidak terduga dengan mengasumsikan dampak ekonomi dari pandemi ini dalam guncangan karena kondisi sosial masyarakat [2], [3]. Pemerintah di berbagai dunia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi ini. Di Selandia Baru, dalam menanggapi pandemi COVID-19, Pemerintah secara progresif meluncurkan berbagai langkah, dengan dua paket utama diumumkan pada Maret dan Mei, dan paket lanjutan pada Juli [4]. Negara-negara di Asia Selatan fokus untuk mengurangi dampak langsung dari pandemi dengan jangka pendek paket stimulus [5]. Sementara di Indonesia, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN 2020.

Terganggunya aktifitas ekonomi berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 di mana tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggaran 2020, terutama dari sisi pembiayaan [6]. Pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, penurunan pendapatan asli daerah, dan perkembangan tingkat pandemi. *Refocusing* program pemerintah daerah kepada 3 prioritas dengan penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi daerah [7], [8]. Belanja modal juga dirasionalisasi hingga 50 persen pada tahun 2020 dengan memangkas anggaran pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat, tanah, renovasi ruangan atau gedung, pembangunan gedung, dan belanja infrastruktur lain yang masih bisa ditunda hingga tahun selanjutnya.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas umum [9]. Skala dan struktur pengeluaran publik untuk investasi produktif oleh pemerintah daerah akan memiliki efek yang kuat pada pertumbuhan ekonomi serta keuntungan lainnya [10]. Pemahaman tentang alokasi dana publik sangat penting karena ini menjawab pertanyaan apakah dana publik digunakan untuk memperkuat lingkungan dan mengurangi ketidaksetaraan, atau mendukung infrastruktur pembangunan [11]. Menurut [12], belanja modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya dalam mendanai pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari setiap uang rakyat dengan mengelola seluruh kas daerah untuk digunakan bagi pelayanan publik di daerah.

Beberapa studi telah diterbitkan di mana penelitian tentang pendapatan asli daerah [9], [13], [14]: Dana Perimbangan [15]–[17] serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [18]–[22]. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di mana penelitian sebelumnya belum ada yang mengambil objek penelitian seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sehingga studi ini terdapat kebaruan penelitian berupa objek penelitian yaitu Pemerintah Provinsi di Indonesia. Didorong oleh kesenjangan penelitian tersebut, studi ini mengungkapkan belanja modal melalui tiga faktor, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan

¹ Korespondensi penulis: Jouzar Farouq Ishak, Telp 08112290432, jouzar.farouq@polban.ac.id

sisanya lebih pembiayaan anggaran. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai pengaruh langsung faktor-faktor tersebut terhadap belanja modal. Kajian yang dilakukan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Kajian ini ditulis dalam beberapa bagian. Bagian pertama tentang pendahuluan. Pada bagian selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan metodologi yang sesuai untuk memenuhi penelitian. Hasil analisis data disajikan pada bagian ketiga dan digabung dengan bagian pembahasan. Pada bagian terakhir, kesimpulan diberikan dengan implikasi, keterbatasan, dan topik potensial untuk studi penelitian masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam studi ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan data yang dipilih data sekunder berasal dari Direktorat Perimbangan Keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh serta pengolahan data dilakukan dengan SPSS dengan penggunaan metode analisis regresi. Pengujian dugaan menggunakan uji F dan Uji t di mana uji F menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat bersama-sama sedangkan uji t ditentukan bagaimana variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sehingga pengujian data untuk lolos asumsi klasik. Selanjutnya, uji multikolinearitas mengetahui variabel terjadi korelasi atau tidak, apabila nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen. Uji autokorelasi yaitu ukuran untuk menentukan keberadaan masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson, yaitu jika $dU < DW < 4-dL$, maka autokorelasi pada model regresi tidak ada. Langkah berikutnya yaitu dengan pengujian regresi pada data panel dengan penggunaan data yang *cross section* dan periode waktu sehingga mengetahui gejala dan efek yang terjadi pada objek studi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian normalitas bertujuan agar penelaahan data terdistribusi normal atau di luar itu. Adapun pelaksanaan pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan 5%. Pada Tabel 1 tentang mendeskripsikan detail hasil pengujian. Selain terpenuhi normalitas, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan tingkat sig lebih dari 0,05 dan bebas dari multikolinearitas pada persamaan regresi yang dapat dilihat Tabel 1 di mana nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF tidak mencapai 10. Tabel 1 memperlihatkan tidak terjadi autokorelasi yang dibuktikan di mana nilai model persamaan 1,737 yang berada di antara 1,258 – 2,349.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran simultan terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menggarisbawahi dampak pendapatan asli daerah terhadap belanja modal [9], [13], [14]. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari pendapatan asli daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah. Potensi pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan supaya pembangunan sarana serta prasarana peningkatan dalam pembelanjaan melalui belanja modal, maka ketika pendapatan asli daerah bertambah sehingga perolehan belanja modal menjadi tinggi [14].

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik

	Koefisien		Uji Kolinearitas		VIF	Uji Durbin-Watson
	B	t	Sig	toleransi		
Konstanta	,771					1,737
PAD	,065	4,512	,256	,153	6,519	
DAPER	,081	3,553	,148	,287	3,486	
SiLPA	,579	14,687	,575	,323	3,094	

Kedua, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dana perimbangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh positif dana perimbangan terhadap belanja modal [15]–[17]. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku belanja modal sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Pendapatan daerah yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat, menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan mengelola kekayaan daerah secara proporsional dan profesional, serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya

mengalokasikan anggaran untuk sektor belanja modal [23]. Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur daerah adalah karena dana perimbangan yang dikirim dari pemerintah pusat dan digunakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah, khususnya belanja modal [24].

Tabel 2. Uji Pengaruh

Variabel Independen	Variabel Dependen	t	F
Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	,000	,000
Dana Perimbangan		,000	
SiLPA		,000	

Terakhir, penelitian ini mengungkapkan bahwa konsekuensi sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal signifikan dan mengkonfirmasi yang mendukung studi sebelumnya [19]–[22]. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya penerimaan pembiayaan digunakan menutupi kekurangan di mana realisasi pendapatan lebih sedikit daripada realisasi belanja dan penggunaan dana untuk belanja modal yang secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat [25]. Apabila jumlah SiLPA yang terlalu banyak terdapat indikasi belum optimalnya penggunaan APBD untuk peningkatan perekonomian daerah dan layanan publik lebih baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, agar pengelolaan keuangan berkualitas baik maka diperlukan perencanaan anggaran yang mumpuni.

4. KESIMPULAN

Dari sisi pemerintah, studi ini menunjukkan dampak penting pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pembiayaan penerimaan melihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya terhadap belanja modal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah provinsi untuk fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah karena ini adalah kunci keberhasilan. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan seperti dana bagi hasil pajak atau dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat mempengaruhi alokasi belanja modal untuk pemerintah provinsi. Hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran di mana SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik. Meskipun studi ini memberikan beberapa temuan penting, studi ini memiliki dependensi yang dapat dijelaskan untuk masa yang akan datang. Pertama, studi ini berfokus pada pemerintah provinsi di Indonesia sehingga membatasi hasil temuan. Dengan demikian, untuk mereplikasi penelitian diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Kedua, untuk menganalisis hubungan antar variabel maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan *partial least square* dengan *software* SmartPLS. Terakhir, dampak terhadap belanja modal dapat diidentifikasi konstruk-konstruk selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pembiayaan penerimaan SiLPA dengan komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sisi pembiayaan melalui penerimaan dan pengeluaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Gopinath, "The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression," *The Daily Tribune*, vol. April 15, 2020.
- [2] S. Barua, "Munich Personal RePEc Archive COVID-19 pandemic and world trade: Some analytical notes COVID-19 pandemic and world trade: Some analytical notes," *Munich Personal RePEc Archive*, pp. 1–36, 2020.
- [3] N. Loayza and S. M. Pennings, "Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: A Primer for Developing Countries," *Ssrn*, no. 28, 2020.
- [4] I. Ball, "Burning the buffer: New Zealand's budgetary response to COVID-19," *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 33, no. 1, pp. 95–105, 2021, doi: 10.1108/JPBAFM-09-2020-0162.
- [5] B. Upadhaya, C. Wijethilake, P. Adhikari, K. Jayasinghe, and T. Arun, "COVID-19 policy responses: reflections on governmental financial resilience in South Asia," *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 32, no. 5, pp. 825–836, 2020, doi: 10.1108/JPBAFM-07-2020-0130.
- [6] A. Onibala, T. O. Rotinsulu, and I. P. F. Rorong, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah," *J. Pembang. Ekon. dan Keuang. Drh.*, vol. 22, no. 2, pp. 67–89, 2021.
- [7] N. Shamadiyah and A. Jayaputra, "Social Protection for the Elderly During the Covid-19 Pandemic,"

- in *ICoSPOLHUM 2020*, 2021, vol. 495, pp. 318–322, doi: 10.2991/assehr.k.210125.053.
- [8] N. Suparman, “Strategic priorities and accountability for allocating the state budget amid Covid-19 pandemic in Indonesia,” *J. Perspekt. Pembiayaan dan Pembangunan. Drh.*, vol. 9, no. 1, pp. 61–72, 2021, doi: 10.22437/ppd.v9i1.11640.
- [9] Y. Rizal and Erpita, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal,” *J. Samudra Ekon.*, vol. 3, no. 1, pp. 74–83, 2019.
- [10] H. Gao, “Public land leasing, public productive spending and economic growth in Chinese cities,” *Land use policy*, vol. 88, no. June, p. 104076, 2019, doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104076.
- [11] E. Talen and L. Anselin, “City cents: Tracking the spatial imprint of urban public expenditures,” *Cities*, vol. 108, no. June 2020, p. 102962, 2021, doi: 10.1016/j.cities.2020.102962.
- [12] W. Priambudi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal,” *J. Nominal*, vol. VI, no. 1, pp. 136–147, 2017.
- [13] D. R. Agustian, I. Ismatullah, and D. Iswanto, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Sukabumi,” *JAMMI - J. Akunt. UMMI*, vol. Volume 1, no. No 1, pp. 101–111, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/jammi/article/view/953>.
- [14] S. Dini, F. B. Sigiuro, D. Y. B. D. Saribu, and J. S. Hutagalung, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi,” *J. Ilm. MEA*, vol. 5, no. 2, pp. 1118–1137, 2021.
- [15] N. F. G. Hasibuan and S. Tiara, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara,” *Liabilities (Jurnal Pendidik. Akuntansi)*, vol. 4, no. 2, pp. 127–140, 2021, doi: 10.30596/liabilities.v4i2.7771.
- [16] Padriyansyah and M. Said, “Pengujian secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal,” *J. Ratri (Riset Akunt. Tridinanti)*, vol. 2, no. 2, pp. 76–82, 2021.
- [17] A. Suparta, “Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal,” *Kindai*, vol. 17, no. 1, pp. 55–64, 2021.
- [18] N. Y. Aditya and N. Dirgantari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015,” *Kompartemen*, vol. XV, no. 1, pp. 42–56, 2017.
- [19] R. Farel, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor,” *Signifikan J. Ilmu Ekon.*, vol. 4, no. 2, pp. 189–210, 2015, doi: 10.15408/sjie.v4i2.2305.
- [20] E. Jikwa, A. Salle, and P. K. A. Layuk, “Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA terhadap Belanja Modal,” *J. Kaji. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–15, 2017.
- [21] Maryadi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012,” *J. Ilm. Ekon. Pembangunan.*, vol. 05, no. 01, pp. 1–29, 2014.
- [22] I. Mentayani and Rusmanto, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal,” *J. InFestasi*, vol. 9, no. 2, pp. 91–102, 2013.
- [23] R. A. Rifai, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal,” *E-Journal Katalogis*, vol. 5, no. 7, pp. 169–180, 2017.
- [24] M. A. Juniawan and N. P. S. Suryantini, “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. 7, no. 3, pp. 1255–1281, 2018, doi: 10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05.
- [25] R. P. Laksmi and S. Hadi, “Pengaruh PAD , DAU , SiLPA , Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota,” *Ekbisi*, vol. VIII, no. 1, pp. 35–46, 2013.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari editor, reviewer, dan para penyaji dalam Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (5th SNP2M) 2021 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Selain itu, penulis berterima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bandung terkait dukungan pendanaan melalui bantuan penyaji seminar nasional.